

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachmad Budiono, 1997, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti, Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Asri Wijayanti, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, Christine ST Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Darwan Prinst, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
- Sendjun H. Manulang, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan*, Jakarta, Visimedia.
- Wawan Zulmawan, 2017, *Panduan Praktis Pelaksanaan Hubungan Industrial*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Chazali H. Situmorang., “The Nation’s Commitment In Old Age Insurance For Workers”, *Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Dede Agus., “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Buruh/Pekerja”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Inca Rahel Lalihatu, Desie. M. D. Warouw, dan Linkan E. Tulung., “Peranan Humas Dalam Mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pedagang Pasar Segar PAAL2”, *Jurnal Acta Diura*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2017.
- Joupy. G. Z. Mambu., “Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 5, Juli 2015.
- Lina Nur Hidayah dan Teguh Santoso., “Kualitas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik Untag Surabaya*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- M. Febriansyah Putra, Budiman Ginting, Hasim Purba, dan Utari Maharany Barus., “Pertanggung Jawaban BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Peserta EKS Jamsostek”, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, November 2015.
- Rimluk S. Buhoy., “Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Kabupaten Murung Raya)”, *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3 Desember 2013.
- Siti Ummu Adillah dan Sri Anik., “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Yustisia*, Vol. 4, No. 3, September-Desember 2015.
- Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi., “Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Kasus pada PT Batik Keris Sukoharjo)”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No. 1, Juni 2012.
- Ujang Charda S., “Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No.1, Februari 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- R.I., Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- R.I., Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- R.I., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- R.I., Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- R.I., Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Situs Internet

- Eka Arifa Rusqiyati, “Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan DIY Baru Tujuh Persen”, <https://m.antarayogya.com/berita/329196/kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-diy-baru-tujuh-persen>. diakses pada tanggal 21 April 2017 pukul 12.00 WIB.
- Eros Rosid, “Peran Pemerintah dalam Ketenagakerjaan”, <http://www.spsitasik.org/2014/05/peran-pemerintah-dalam-ketenagakerjaan.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB.
- Rendika Ferri K, “Belum Semuanya Perusahaan di DIY daftar BPJS Ketenagakerjaan”, <http://jogja.tribunnews.com/2015/09/01/belum-semuanya-perusahaan-di-diy-daftar-bpjs-ketenagakerjaan>. diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 13.00 WIB.
- Rika Arba, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja”, <https://rikaarba.wordpress.com/2014/12/27/jaminan-sosial-tenaga-kerja-sistem-pengupahan-dan-kesejahteraan-pekerja>. diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 22.30 WIB.

Sumber lain

Wawancara dengan Ibu Pingky selaku Anggota Pengawasan Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

Wawancara dengan Bapak Budiono selaku Bagian Umum di PT Karya Perwita.

Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Bagian Administrasi di PT Sukses Mandiri Utama.